

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2022



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Kuda laut Telp. Fax. Kolonodale 94761

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya lah sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat selesai dengan baik.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran Tahun 2022.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan dan pemikiran – pemikiran kedepan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini disampaikan semoga menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparaturnya Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 21 Februari 2023

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali Utara,



HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Gambaran Umum.....	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
I.3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	2
I.4. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.	3
I.5. Isu Strategi Yang Dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
II.1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD	7
II.2. Sistematis Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala	
Daerah yang Terpilih.....	7
II.3. Visi dan Misi Sekretariat DPRD	8
II.4. Sasaran dan Tujuan Sekretariat DPRD.....	9
II.5. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	10
II.6. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
III.1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	13
III.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .	14
III.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022.....	16
III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2019-2022 ..	17
III.1.4. Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Atau Kegagalan	17
III.1.5. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2021 ..	18
III.2. Akuntabilitas Keuangan	18

Bab IV PENUTUP	22
IV.1. Kesimpulan	22
IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja.....	22

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengelolaan sumber daya di daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, maka untuk optimalnya penyelenggaraan kewenangan Daerah di bentuklah perangkat, Badan dan Dinas Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi di lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan sebagai supervisor, dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag).

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah serta mengkoordinasikan tugas – tugas Sekretariat dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

I.3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

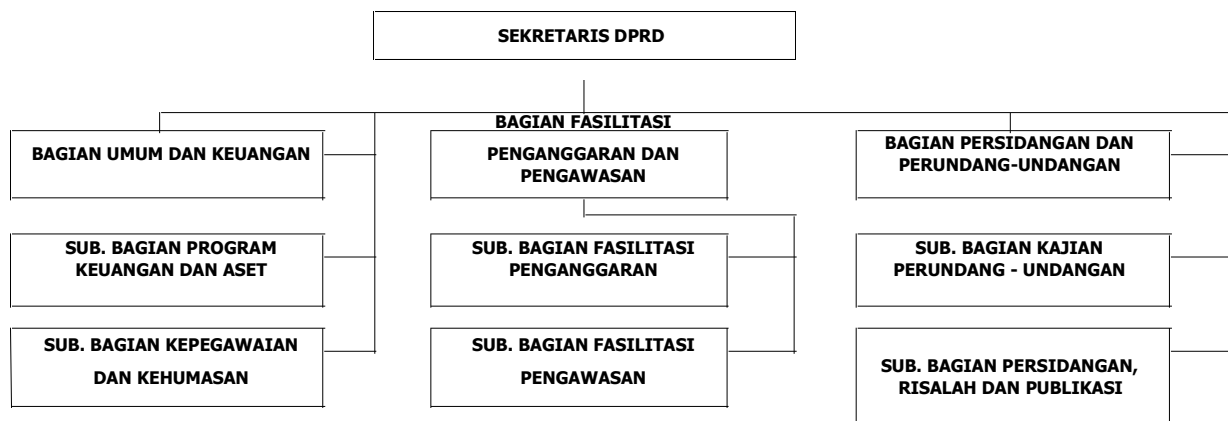
Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR : 37 TAHUN 2018

TENTANG : KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA



I.4. Lingkungan Stategis yang berpengaruh.

Kondisi Lingkungan Stategis yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dibagi atas kondisi Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal.

1.4.1. Lingkungan Internal terdiri dari:

a. Sumber Daya Manusia :

Keadaan PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebanyak 83 Orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2	Kepala Bagian	3	
3	Kepala Sub Bagian	1	
4	Staf Sekretariat	18	
5	Tenaga Kontrak	68	
	Jumlah	96	

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KERANGAN
1	Golongan IV/c		
2	Golongan IV/b	1	
3	Golongan IV/a	1	
4	Golongan III/d	6	
5	Golongan III/c	1	
6	Golongan III/b	1	
7	Golongan III/a	7	
8	Golongan II/d	9	
9	Golongan II/c		
10	Golongan II/b	1	
11	Golongan II/a	1	
12	Golongan I/c		
13	Tenaga Kontrak	68	
Jumlah		96	

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KERANGAN
1	Megister S-2	2	
2	Sarjana S-1	31	
3	Diploma / DIII		
4	SLTA	63	
5	SLTP		
Jumlah			

b. Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud dengan Prasarana dan sarana adalah perangkat peralatan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa Gedung Perkantoran beserta fasilitas pendukung lainnya.

1.4.2. Lingkungan eksternal terdiri dari :

a. Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sudah memadai untuk kelancaran masuknya informasi tentang perkembangan kebijaksanaan pemerintah yang terbaru maupun berbagai peraturan perundang-undangan sehingga suplay informasi kepada lembaga DPRD yang menjadi lancar.

b. Ketersediaan Tenaga Ahli/Staf Ahli

Tenaga ahli/Staf Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD ini sangat kurang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD diperlukan tenaga ahli perundang-undangan, legal drafting, perencanaan maupun berbagai pakar ilmu-ilmu ekonomi maupun sosial tidak tersedia. Tenaga Ahli/Staf Ahli yang tersedia pada Sekretariat DPRD hanya ada 5 (Lima) orang, yang seharusnya setiap Fraksi mempunyai 5 (Lima) Tenaga Ahli/Staf Ahli.

c. Gangguan Energi Listrik

Aliran Listrik dari PLN yang tidak stabil menghambat kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi, maupun banyak merusak peralatan elektronika pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berakibat mengganggu kualitas kerja maupun waktu dan dana.

1.5. Isu Strategi yang dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
- b. Kurang tertib penyampaian materi-materi raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD, sehingga waktu pembahasan oleh DPRD tidak maksimal.
- c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
- e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
- f. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian.
- g. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
- h. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
- i. Kurang disiplinnya pimpinan dan anggota DPRD dalam menyelesaikan tugas dan pertanggungjawaban keuangan.
- j. Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Sekretariat DPRD Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
- e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

2.2 Sistematis Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2018–2021, mempunyai Visi **"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan beriman melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional"**.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Profesional.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Daya Dukung Lingkungan

Secara Berkelanjutan.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Melalui Iklim Usaha yang Penataan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Yang Inklusif.
6. Mewujudkan Kerukunan dan Harmonisasi Kegamaan.
7. Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3 Visi dan Misi Sekretariat DPRD

2.3.1 Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD sebagai salah satu instansi pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Sekretariat DPRD menetapkan visi

“Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Dprd Yang Efektif, Efesien Dan Akuntabel Dalam Menunjang Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif”

2.3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola administrasi Keuangan Sekretariat Dewan Yang Tertib dan Lancar Akuntabel;
- b. Menyelenggarakan Rapat – Rapat DPRD yang Optimal dalam Pembahasan Produk –Produk Hukum Daerah dan Produk Dewan
- c. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kompleks Perkantoran Dewan.

2.4 Keselarasan kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra secretariat DPRD tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dengan Kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan kinerja misi 5

Misi 5 Meningkatkan Profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelolah pemerintahan yang baik
Tujuan indeks reformasi birokrasi
Sasaran Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD Miningkat

2.5 Sasaran dan Tujuan Sekretariat DPRD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Sekretariat DPRD mempunyai tujuan :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
1	Indeks Rb	Terwujudnya Pemerintah yang efisien dan efektif	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD meningkat

2.6 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021.

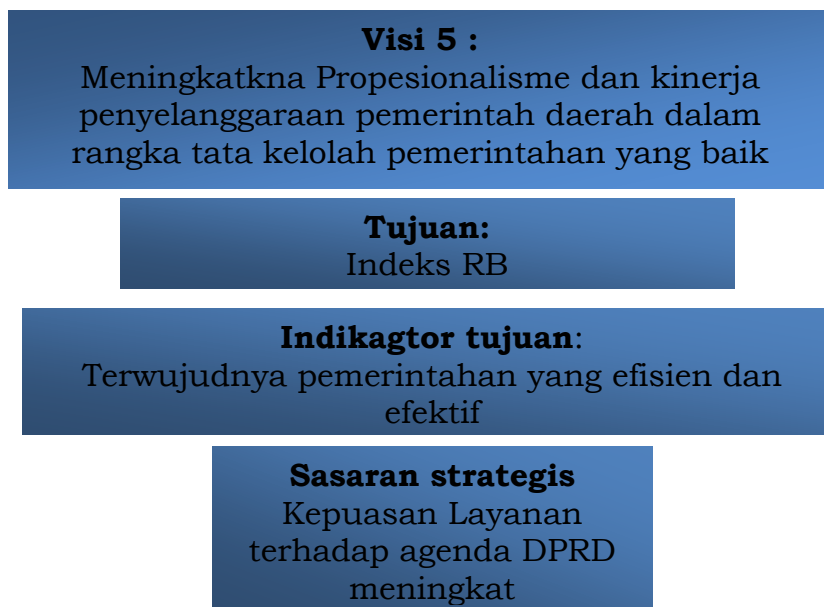
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel. 5
Indikator Kinerja Utama(IKU) Sekretariat DPRD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI IKU
1.	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD - Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja DPRD - Ketepatan waktu dalam memfasilitasi kegiatan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase administrasi yang tepat waktu - Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah - Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar - Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

2.7 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja sekretariat DPRD, maka sekretariat dprd menyusun cascading kinerja.cascading tersebut tersusun dalam matriks selaras dengan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sestematis dalam pencapaiannya.



2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Tabel. 6

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
<i>1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase terpenuhnya hak-hak ASN - Presentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur - Presentase lancarnya administrasi perkantoran - Presentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesiensi - Presentase lancarnya administrasi perkantoran - Presentase terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien - Persentase pemenuhan penunjan urusan pemerintah daerah kabuptane kota 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

PROGRAM	ANGGARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.617.696.831
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 258.702.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.326.443.054
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.973.185.586
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.828.848.761
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 729.359.049
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 11.403.742.044
Layanan Administrasi DPRD	Rp. 1.500.671.950
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 938.067.950
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 74.298.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 1.541.074.726
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 1.757.392.034
Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 5.233.090.006

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran tersebut sebesar **Rp. 38.182.571.993** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 7
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD - Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja DPRD - Ketepatan waktu dalam memfasilitasi kegiatan DPRD 	100%	100	100	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase administrasi yang tepat waktu - Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah - Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar - Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal
		Nilai rata rata capaian kinerja				

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Organisasi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 9.
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \geq$		Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	1	Tinggi
3	$66 \leq 75$		Sedang
4	$51 \leq 65$		Rendah
5	≤ 50		Sangat Rendah
	JUMLAH	1	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut

Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Sasaran kesatu Terwujudnya pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja dengan pencapaian kinerja rata – rata 93,77% dengan predikat Sangat Baik, perbandingan dapat dilihat dari terselesainya kegiatan – kegiatan di tahun 2022

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD	0	87,91%
		-		

Dari table diatas dapat dijelaskan, (perbandingan realisasi kinerja indicator) dikarenakan realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dipaparkan karena terjadi perubahan data indicator kinerja utama set DPRD pada tahun 2022 yang disebabkan adanya perubahan IKU Bupati tahun 2022 yang terdapat didalam RPJMD. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 87,91% dengan predikat tinggi dari target ditetapkan sebesar 100%.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2019-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			RENSTRA 2021 – 2026	TAHUN 2022	(%)
1.	Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah dan terpenuhinya penunjang kebutuhan kerja DPRD	- Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	93,77%	93,77%
		- Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	81,27%	81,27%
Nilai Rata-Rata				87,91%	

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 Dengan perbandingan Target Renstra tahun 2021-2026 realisasi Rata-rata Sebesar 87,91 % dari target renstra sebesar 100 % dengan capaian Rata-rata sebesar 87,91%

3.1.4 FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN ATAU KEGAGALAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Adapun factor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

Meningkatnya Pelayanan Publik Di OPD yang cepat Mudah, Bermutu, adil dan terjangkau dapat dilihat dari indicator dengan pencapaian kinerja rata – rata di tahun 2022 sebesar 93,77% dengan predikat sangat baik.

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Meningkatnya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilihat dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 81,27% dengan predikat tinggi

3.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Kab. Morowali Utara dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat-rapat tersebut berupa tape recorder digital dan tape recorder manual. Sekretariat DPRD melalui Bagian Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat. Selain itu Sekretariat DPRD selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, SMS, WhatsApp dan email kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Morowali Utara.

3.1.6 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari table diatas dapat dilihat dengan indicator kinerja dan tercapainya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terpenuhi dari tahun 2021 realisasi kinerjanya secesar 68.92% mengalami Kenaikan pada tahun 2022 sebesar 93,77%.

2. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Dari tabel diatas pada sasaran meningkatnya Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan beberapa indikator meningkat yaitu sebesar 81,27%

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2019-2022 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah daerah dan Masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan Prinsip Anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12.

**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Presentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu,	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	Program Penunjang	2.692.544.731	2.617.696.831	100%
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan per-UU	100%	100%	Urusan Pemerintah	67.806.000	67.806.000	100%

adil dan terjangkau	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Per-UU	100%	83,34%	Daerah	205.896.000	190.896.000	83,34%
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	Kabupaten/Kota	33.964.756	33.963.632	100%
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	90,38%		972.306.964	753.070.417	90,38%
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	63,64%		117.090.520	95.711.279	63,64%
	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	100%	100%		170.791.500	170.736.900	100%
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	99,92%		65.423.065	63.376.550	99,92%
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan per-UU yang disediakan	100%	99,12%		54.986.250	54.674.100	99,12%
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	99,12%		1.163.334.700	1.152.910.176	99,12%
	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	100%		18.258.750	18.255.000	100%
	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%		6.969.997.204	6.954.930.586	100%
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	99,85%		6.500.000	6.495.000	99,85%
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	96,82%		382.781.320	368.252.261	96,82%
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99,99%		485.599.500	485.542.500	99,99%
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	100%		2.003.676.000	1.968.559.000	100%
	Jumlah kendaraan perornangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	100%		80.000.000	79.882.248	100%
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	100%	81,93%		227.822.000	196.039.801	81,93%

		pajaknya						
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	100%		37.320.000	37.320.000	100%
		Jumlah saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%		456.906.800	416.117.000	100%
		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100%	100%		11.072.286.348	11.072.286.348	100%
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	100%	88%		349.000.000	317.494.696	88%
		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	100%	24%		62.500.000	13.961.000	24%
		Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100%	99,94%		361.085.000	360.671.950	99,94%
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga yang disediakan	100%	100%		1.140.000.000	1.140.000.000	100%
2.	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	100%	88,59%	Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	939.409.000	938.067.950	88,59%
		Jumlah dokumen hasil pemahasan KUA PPAS	100%	49%		79.813.500	74.298.000	49%
		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	100%	53,15%		1.455.005.000	1.299.986.440	53,15%
		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hokum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	100%	96,60%		250.000.000	241.088.288	96,60%
		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	100%	87,42		482.927.100	425.117.684	87,42
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan RESES	100%	100%		1.332.274.350	1.332.274.350	100%
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	99,75		5.234.154.000	5.233090.000	99,75

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2019-2022, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 2 sasaran yang terdiri dari 32 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 22 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik, 6 indikator kinerja sasaran memenuhi Kriteria Tinggi, 2 indikator dengan kriteria rendah, dan 2 indikator dengan kriteria sangat rendah.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 21 Februari 2023

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali Utara,



HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003